



Pengaruh Literasi Keuangan, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Kandangan

Nindia Nur Arifiana Putri , Yeni Tata Rini*, Hafizh Reza Palevi, Anwar Made

Universitas Gajayana Malang123

yeni.tatarini@unigamalang.ac.id*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi determinan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah semi-perdesaan, dengan fokus spesifik pada pengaruh literasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui desain survei eksplanatori. Teknik sensus (total sampling) diterapkan dengan melibatkan seluruh populasi yang terdiri dari 39 sekolah dasar penerima Dana BOS di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri (78 responden: Kepala Sekolah dan Bendahara). Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil empiris mengungkap bahwa literasi keuangan dan adopsi teknologi informasi (seperti aplikasi ARKAS dan SIPLah) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Secara paradoksal, kompetensi SDM secara parsial tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap akuntabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa kapabilitas individu menjadi tumpul tanpa dukungan ekosistem yang memadai. Namun, secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 48,3% variasi akuntabilitas. Studi ini memperkaya literatur manajemen pendidikan dengan menyoroti "anomali kompetensi" di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Temuan ini menantang asumsi umum bahwa kompetensi individu secara otomatis menghasilkan kinerja akuntabel, membuktikan bahwa faktor tersebut sangat bergantung pada dukungan infrastruktur sistemik. Penelitian ini terbatas pada satu kecamatan dengan karakteristik semi-perdesaan. Studi masa depan disarankan untuk memperluas cakupan geografis atau menggunakan metode kualitatif guna menggali lebih dalam mengenai hambatan struktural yang memengaruhi kinerja SDM. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sekolah perlu menggeser fokus dari sekadar pelatihan individu menuju penguatan sistem pengendalian internal dan modernisasi infrastruktur teknologi. Sinergi antara literasi finansial dan alat bantu digital terbukti lebih efektif dalam mendongkrak transparansi dibandingkan hanya mengandalkan kompetensi personal. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat sekolah dasar berpotensi memulihkan kepercayaan masyarakat (orang tua dan komite sekolah) serta meminimalisir risiko penyimpangan anggaran yang merugikan kualitas pendidikan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai urgensi integrasi teknologi dan literasi keuangan sebagai solusi atas inefisiensi pengelolaan dana pendidikan di wilayah yang menghadapi kesenjangan infrastruktur dan akses pelatihan.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Dana BOS; Literasi Keuangan; Kompetensi SDM; Teknologi Informasi; Manajemen Sekolah Dasar.*

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan lebih dari Rp54 triliun untuk Dana BOS Reguler pada tahun 2023, yang meliputi lebih dari 200.000 sekolah dasar (Kemendikbudristek, 2023). Efektivitas pemanfaatan dana ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya sekolah, seperti infrastruktur, tenaga pendidik, dan teknologi informasi. Di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, banyak sekolah dasar menghadapi keterbatasan sumber daya. Menurut data dari Kemendikbudristek, salah satu sekolah dasar di wilayah tersebut tidak memiliki akses internet, meskipun dilengkapi dengan 12 ruang kelas dan satu perpustakaan. Karakteristik Kecamatan Kandangan sebagai wilayah semi-perdesaan menghadirkan hambatan tersendiri, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur fisik dan kapabilitas sumber daya manusia yang krusial bagi terciptanya tata kelola Dana BOS yang transparan serta tepat guna.

Hasil pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 mengungkap berbagai ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Kediri, termasuk di Kecamatan Kandangan. Data dari KPPN Kediri menunjukkan bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan pada tahun tersebut hanya mencapai 85,9% dari pagu total Rp228,81 miliar. Meskipun persentase ini cukup tinggi, belum ada evaluasi spesifik mengenai efektivitas penggunaan Dana BOS di sekolah dasar wilayah tersebut. Kondisi ini mencerminkan fenomena rendahnya literasi keuangan di kalangan kepala sekolah dan bendahara sekolah dasar di Kabupaten Kediri. Laporan kinerja pemerintah daerah menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam bidang keuangan. Literasi keuangan yang rendah dapat berdampak buruk pada pengelolaan Dana BOS, seperti risiko kesalahan dalam pelaporan atau penggunaan dana.

Keberhasilan dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola Dana BOS sangat bergantung pada kapabilitas personel yang terlibat, di mana kecakapan dalam manajemen finansial menjadi variabel penentunya. Penelitian oleh Yuliani (2021) menemukan bahwa kompetensi administrasi kepala sekolah secara signifikan memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan di sekolah dasar negeri, seperti yang tercatat dalam Repository IAIN Palopo. Pemerintah telah meluncurkan aplikasi ARKAS untuk mendigitalisasi pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Timur pada tahun 2023, lebih dari 85% sekolah dasar di Kabupaten Kediri telah mengadopsi ARKAS, namun tantangan muncul akibat kurangnya pelatihan dan infrastruktur teknologi informasi. Sebagaimana diuraikan dalam IT Science Journal, integrasi teknologi informasi menjadi instrumen vital untuk mengoptimalisasi efisiensi dan akuntabilitas.

Langkah ini dinilai mampu mendorong terciptanya tata kelola dana yang memiliki tingkat transparansi tinggi serta alokasi yang lebih presisi. Penelitian oleh Ahmad dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan Dana BOS berbasis web dapat memudahkan penanganan data, termasuk pemasukan, pengambilan, dan pembuatan laporan, seperti yang dipublikasikan di eJournals Universitas Mulawarman. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi yang efektif membutuhkan dukungan pelatihan dan infrastruktur yang memadai, yang masih menjadi kendala di Kecamatan Kandangan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya di Kabupaten Kediri, dalam meningkatkan pengelolaan Dana BOS.

b. Gap penelitian

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Misalnya, penelitian oleh Hosen dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban bunga yang biasanya dihadapi pelaku usaha kecil. Studi lain oleh Sari dan Fitriani (2022) menemukan bahwa kolaborasi antara bank syariah dan UMKM halal di sektor makanan telah meningkatkan sertifikasi halal dan daya saing produk lokal. Namun, sejumlah studi juga menyoroti adanya kendala dari sisi lembaga keuangan, seperti keterbatasan manajemen risiko, preferensi terhadap akad berbasis jual beli (*murabahah*) dibandingkan akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta kurangnya pendekatan inklusif dalam menilai kelayakan UMKM.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM halal di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji jenis-jenis pembiayaan yang paling efektif, tantangan implementasi di lapangan, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat keterhubungan antara bank syariah dan pelaku UMKM halal.

KAJIAN TEORI

2.1. Teori Akuntabilitas Publik

Penelitian ini menggunakan Resource-Based View (RBV), yang memandang pembiayaan sebagai sumber daya strategis yang dapat meningkatkan kapabilitas operasional UMKM untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar halal. Selain itu, Financial Intermediation Theory menjelaskan peran bank dalam mengurangi asimetri informasi bagi pengusaha kecil.

2.1.1 Teori Good Governance

United Nations Development Programme (1997:9), yang diperbaharui pada tahun 2020, menggambarkan good governance sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan

yang menekankan nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap langkah pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Di bidang pengelolaan Dana BOS, penerapan konsep ini amat diperlukan agar dana dari anggaran negara dimanfaatkan dengan tanggung jawab penuh dan terbuka, guna mendukung perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2.1.2 Pengertian Literasi Keuangan

Chen dan Volpe (1998) menguraikan literasi keuangan sebagai kecakapan individu dalam mencerna prinsip-prinsip finansial mendasar, yang kemudian diaplikasikan guna mengambil keputusan pribadi secara tepat dan bijaksana. Dalam lingkungan organisasi publik seperti sekolah, hal ini meliputi pemahaman tentang pengalokasian anggaran, penyusunan laporan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Literasi keuangan yang kuat pada kepala sekolah dan bendahara merupakan fondasi utama untuk memastikan pemanfaatan Dana BOS selaras dengan aturan serta prioritas kebutuhan, sekaligus memudahkan pertanggungjawaban administratif dan publik.

2.1.3 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Spencer dan Spencer (1993) mengonseptualisasikan kompetensi sebagai karakteristik fundamental yang inheren dalam diri individu, yang secara kausalitas menjadi determinan utama bagi kualitas kinerja maupun produktivitas yang dihasilkan. Dalam bidang pengelolaan keuangan, kompetensi sumber daya manusia melibatkan keterampilan teknis, kemampuan administratif, serta integritas dan dedikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan publik. Di lingkungan sekolah, khususnya bagi kepala sekolah dan bendahara, kompetensi ini menjadi kunci utama dalam menjalankan pengelolaan dana yang akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan Dana BOS. Penelitian ini juga merujuk pada Dynamic Competency Model (DCM) yang dikembangkan oleh Rodriguez dan Patel (2022), yang mempertahankan esensi definisi Spencer bahwa kompetensi merupakan karakteristik fundamental yang membedakan performa unggul.

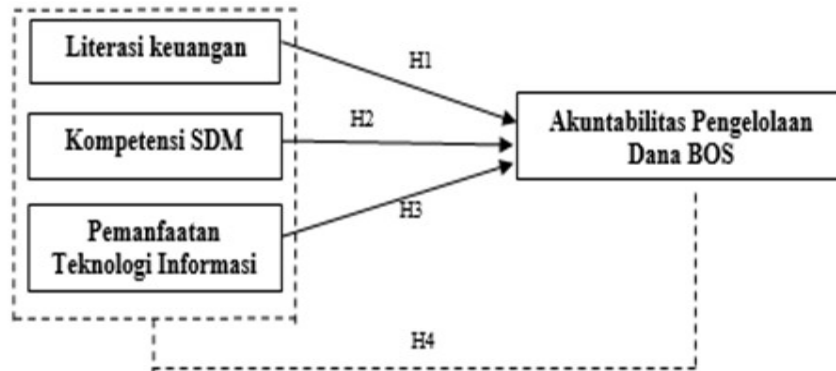
2.1.4 Teknologi Informasi

Laudon (2015) mendefinisikan teknologi informasi sebagai kumpulan perangkat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data guna membantu proses pengambilan keputusan serta koordinasi di dalam organisasi. Penerapan aplikasi seperti ARKAS di sekolah dasar memungkinkan pelaporan pemanfaatan Dana BOS dilakukan dengan lebih teratur, cepat, dan terbuka. Lebih lanjut, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko kesalahan administratif, sehingga seluruh proses pelaporan Dana BOS menjadi lebih sistematis, efisien, dan transparan.

2.1.5 Kerangka Konsep

Kendati diskursus mengenai akuntabilitas Dana BOS telah banyak diulas dalam berbagai studi terdahulu, literatur yang secara komprehensif mensintesis interaksi antara literasi keuangan, kapabilitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi

masih tergolong langka, khususnya pada konteks jenjang sekolah dasar. Berlandaskan pada sintesis teori yang telah dipaparkan sebelumnya, konstruksi berpikir dalam penelitian ini dipetakan melalui kerangka konseptual berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

2.1.6 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Literasi keuangan merefleksikan kedalaman kognisi individu terkait prinsip serta aplikasi finansial yang esensial dalam tata kelola anggaran publik. Dalam konteks ini, kepala sekolah maupun bendahara yang memiliki fondasi literasi yang kokoh memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengelola Dana BOS secara presisi, efektif, dan selaras dengan tuntutan akuntabilitas. Chen dan Volpe (1998) menekankan bahwa literasi ini memengaruhi keputusan keuangan yang rasional. Beberapa studi sebelumnya mengindikasikan bahwa literasi keuangan berkontribusi positif pada efisiensi pengelolaan dana, khususnya di bidang pendidikan. Sebagai contoh, penelitian Pratiwi (2023) dan Nursalam (2024) menemukan bahwa peningkatan literasi keuangan meningkatkan kualitas pengelolaan Dana BOS di lembaga pendidikan. Agustini et al. (2022) juga menunjukkan bahwa literasi keuangan secara signifikan memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Temuan serupa dari Rodziah (2024) di Kabupaten Kediri mengungkapkan bahwa literasi keuangan yang rendah melemahkan pertanggungjawaban dana di tingkat lokal, yang tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, tetapi juga membuka peluang penyimpangan anggaran, seperti pembelian barang tanpa transparansi atau laporan keuangan yang tidak tepat.

Ketidakmampuan dalam menginternalisasi prinsip penganggaran berbasis kinerja dan prosedur akuntansi pemerintah, termasuk ketatnya standar 5T (tepat sasaran, jumlah, waktu, guna, dan harga), sering kali memicu perilaku defensif di kalangan pengelola dana sekolah. Fenomena ini bermuara pada preferensi berlebihan terhadap pos belanja rutin yang dianggap minim risiko administratif, namun sayangnya berimplikasi pada capaian program yang tidak optimal. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk inovasi seperti laboratorium digital atau pelatihan guru malah habis untuk keperluan sehari-hari yang manfaatnya sulit diukur. Selain itu, literasi keuangan yang rendah menghalangi kerja sama sekolah dengan komite atau orang tua siswa, karena laporan keuangan yang

tidak sistematis sulit dipahami, sehingga menimbulkan ketegangan dan mengurangi partisipasi dalam pendanaan program sekolah.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus memperkuat program pengembangan berkelanjutan, seperti workshop rutin, pendampingan online melalui Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMS), atau benchmarking antar-sekolah yang fokus pada kepala sekolah, bendahara, dan tim pelaksana. Pendekatan terintegrasi dengan pembelajaran daring berbasis micro-learning telah terbukti berhasil di beberapa daerah, karena memungkinkan peserta belajar modul keuangan sesuai kebutuhan dan jadwal yang fleksibel. Dengan demikian, meningkatkan literasi keuangan di tingkat lokal bukan hanya langkah administratif, melainkan strategi penting untuk menciptakan sekolah yang akuntabel, transparan, dan berfokus pada hasil belajar yang unggul. Berdasarkan sintesis argumen dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan dugaan sementara sebagai berikut: **H1**: Literasi keuangan memiliki kontribusi signifikan terhadap kualitas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS pada jenjang Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

2.1.7 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Kompetensi sumber daya manusia memainkan peran krusial dalam menjalankan pengelolaan anggaran sekolah secara akuntabel, dari tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan. Spencer dan Spencer (1993) menjelaskan bahwa kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara langsung memengaruhi performa kerja. Penelitian oleh Yuliani (2021) menunjukkan bahwa kompetensi kepala sekolah secara signifikan memengaruhi kualitas pelaporan keuangan Dana BOS. Demikian pula, Feri Harnando (2024) dalam studinya di Kabupaten Siak menemukan bahwa kompetensi bendahara sekolah berkontribusi signifikan terhadap kejelasan dan akuntabilitas laporan dana tersebut. Di sisi lain, temuan empiris yang kontras disajikan oleh Siti Munjiah dan Rulfah (2021) dalam risetnya di Banda Aceh. Studi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia ternyata tidak memiliki dampak statistik yang signifikan terhadap efektivitas manajemen Dana BOS. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa kapabilitas individu semata tidak dapat menjadi garansi keberhasilan jika tidak disokong oleh infrastruktur sistem, mekanisme pengawasan, serta partisipasi yang kuat.

Dalam praktiknya, kompetensi yang tinggi sering kali justru digunakan untuk menutupi kelemahan sistemik. Seorang bendahara yang paham aturan akuntansi pemerintah bisa membuat dokumen yang tampak lengkap secara administratif, namun menyembunyikan masalah seperti mark-up harga atau pembelian fiktif, karena verifikasi internal sekolah lemah, Satuan Pengawas Intern (SPI) tidak berfungsi, dan komite sekolah kurang akses terhadap data anggaran secara real-time. Begitu pula, kepala sekolah yang kompeten secara akademik mungkin terlibat konflik kepentingan, seperti menekan realisasi anggaran untuk menciptakan sisa dana yang diselewengkan, akibat absennya mekanisme whistle-blowing yang aman dan independen.

Untuk itu, diperlukan kerangka kompetensi yang tidak hanya individual, melainkan kolektif dan sistemik. Ini mencakup kompetensi organisasional, seperti memiliki Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sistem informasi keuangan daring terintegrasi dengan Sistem Informasi Pendidikan Daerah-Sekolah (SIPD-S), dan tata kelola risiko tertulis. Kemudian, kompetensi supervisi, yaitu kemampuan pengawas sekolah, inspektorat kabupaten/kota, dan Tim Monitoring BOS untuk melakukan analisis keuangan berbasis data analytics, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Terakhir, kompetensi kolaboratif, di mana orang tua, komite, dan siswa dilibatkan dalam kampanye literasi keuangan sekolah setidaknya dua kali setahun untuk memahami alur dana, indikator capaian, dan mekanisme pengaduan.

Pengalaman di Kota Malang menunjukkan bahwa ketika kompetensi SDM dikombinasikan dengan dashboard keuangan BOS yang dipublikasikan secara daring dan real-time, temuan audit turun 42% dalam dua tahun, sementara partisipasi orang tua dalam pendanaan sukarela naik 27%. Dengan kata lain, kompetensi manusia hanya efektif dalam ekosistem yang transparan, terawasi, dan berbasis data terbuka; tanpa itu, kompetensi individu bisa menjadi alat untuk memperbaiki atau justru memperkuat penyimpangan dengan cara yang lebih canggih. Merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dibangun, penelitian ini mempostulasikan hipotesis kedua sebagai berikut: **H2:** Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas akuntabilitas tata kelola Dana BOS pada jenjang Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

2.1.8 Kontribusi Adopsi Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Dana BOS

Teknologi informasi, termasuk aplikasi seperti ARKAS dan SIPLah, memfasilitasi sekolah dalam merencanakan, mengeksekusi, dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS dengan pendekatan yang terorganisir dan jujur. Laudon dan Laudon (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan informasi secara maksimal dapat mempercepat pertukaran data dan mengurangi risiko pengubahan data. Studi oleh Ahmad dan Rahman (2021) menegaskan bahwa sistem pengelolaan berbasis web berkontribusi pada peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban dalam mengelola Dana BOS. Selaras dengan argumen tersebut, studi Sakdiah et al. (2023) mengonfirmasi bahwa integrasi teknologi informasi berkontribusi vital terhadap akuntabilitas keuangan di tingkat desa, sebuah sektor yang beririsan dengan konteks pendidikan. Akan tetapi, realitas kontradiktif diungkap oleh Bagas Nugraha et al. (2022) pada lokus sekolah dasar negeri di Jambi, di mana pemanfaatan teknologi justru tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap efektivitas Dana BOS. Disparitas hasil ini disinyalir berakar pada keterbatasan kompetensi teknis pengguna serta minimnya intervensi pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat.

3. Metode penelitian

Metodologi penelitian ini dibangun di atas paradigma kuantitatif dengan format survei eksplanatori. Lokus penelitian dipusatkan di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dengan melibatkan seluruh 39 sekolah dasar penerima Dana BOS melalui teknik total sampling demi meminimalisir bias representasi. Instrumen utama berupa kuesioner berskala Likert lima poin dirancang untuk mengukur indikator literasi keuangan,

teknologi informasi, kompetensi SDM, dan akuntabilitas. Sebelum didistribusikan, instrumen tersebut telah melewati validasi ahli serta uji reliabilitas Cronbach's Alpha untuk memastikan nilai konsistensi internal berada di atas standar 0,7. Pengumpulan data dilakukan secara langsung (offline) dengan memperhatikan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di wilayah semi-perdesaan, serta menerapkan protokol etika penelitian seperti informed consent, jaminan kerahasiaan data, dan partisipasi sukarela. Proses analisis data dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yakni statistik deskriptif dan inferensial. Untuk mengukur dampak variabel independen terhadap akuntabilitas, penelitian ini mendayagunakan teknik regresi linier berganda. Sebelum melangkah pada tahap uji hipotesis, serangkaian prosedur validasi dilakukan secara ketat, meliputi pemeriksaan kualitas instrumen serta pemenuhan prasyarat uji asumsi klasik. Selain itu, guna meminimalisir bias respons, dilakukan adaptasi kontekstual pada instrumen—baik dari segi bahasa maupun waktu pengambilan data—agar selaras dengan karakteristik sosiologis dan tingkat literasi responden di Kecamatan Kandangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Kandangan di Kabupaten Kediri memiliki jumlah satuan pendidikan dasar yang cukup besar, terdiri atas 27 Sekolah Dasar (SD) berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta 12 Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut Kementerian Agama. Dengan demikian, total terdapat 39 lembaga pendidikan dasar di wilayah ini, yang meliputi SD dan MI baik negeri maupun swasta.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada para pengelola Dana BOS, yakni Kepala Sekolah, Bendahara BOS, serta guru di seluruh SD dan MI di Kecamatan Kandangan. Populasi penelitian mencakup seluruh satuan pendidikan dasar di wilayah tersebut yang menerima Dana BOS, yakni 39 sekolah. Sampel penelitian terdiri dari 78 responden, yang terdiri atas 39 Kepala Sekolah dan 39 Bendahara BOS.

Penggunaan teknik sensus dinilai tepat karena jumlah populasi relatif kecil dan seluruh anggota populasi memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana BOS. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, yang memungkinkan jangkauan responden lebih luas serta efisiensi dalam pengumpulan data, sejalan dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh indikator Literasi Keuangan (X1) dinyatakan valid karena nilai r hitungnya melebihi r tabel (0,2227), sehingga instrumen tersebut layak digunakan untuk mengukur variabel ini. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,847, yang menandakan bahwa instrumen Literasi Keuangan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Pengujian secara parsial melalui uji t menghasilkan nilai t hitung 2,162, lebih besar dari t tabel (1,992), dengan signifikansi 0,034 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa Literasi Keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS. Secara simultan, uji F juga menunjukkan pengaruh signifikan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang diperkuat dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,483. Artinya, sekitar 48,3% variasi akuntabilitas

pengelolaan Dana BOS dapat dijelaskan oleh Literasi Keuangan, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Secara konseptual, Literasi Keuangan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami konsep-konsep dasar keuangan dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan terkait keuangan baik secara pribadi maupun organisasi (Chen dan Volpe, 1998). Dalam lingkungan sekolah, Literasi Keuangan meliputi pemahaman tentang alokasi anggaran, pelaporan keuangan, hingga tanggung jawab dalam penggunaan dana pendidikan. Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pratiwi (2023) dan Nursalam (2024), menunjukkan bahwa peningkatan Literasi Keuangan berkontribusi positif terhadap kualitas pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan dasar. Selain itu, Agustini et al. (2022) juga menemukan bukti bahwa Literasi Keuangan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Temuan tersebut konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung mampu mengelola keuangan secara efisien dan sesuai prinsip akuntabilitas. Kepala sekolah dan bendahara yang memiliki pemahaman keuangan yang baik dapat merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan penggunaan dana secara transparan, sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti valid dan reliabel, sementara hasil uji t dan uji F menunjukkan bahwa literasi keuangan, bersama dengan variabel lain, memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang cukup tinggi juga menunjukkan model regresi yang digunakan mampu menjelaskan variasi dalam akuntabilitas secara memadai.

Selaras dengan perspektif Romzek dan Dubnick (1987) mengenai akuntabilitas publik, temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana yang akuntabel memerlukan penguasaan konsep keuangan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Literasi keuangan yang baik memungkinkan kepala sekolah dan bendahara untuk memahami petunjuk teknis BOS, menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah secara tepat sasaran, serta mengambil keputusan alokasi dana secara rasional. Studi yang dilakukan Pratiwi (2023) dan Rodziah (2024) di Kabupaten Kediri juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, Chen dan Volpe (1998) menegaskan bahwa literasi keuangan memengaruhi perilaku pengambilan keputusan, khususnya dalam menghindari kesalahan alokasi dana dan penyimpangan administratif. Berdasarkan nilai rata-rata X_1 sebesar 22,4 dari 30, variasi tingkat literasi keuangan di lapangan masih cukup tinggi, sehingga perlu adanya upaya peningkatan melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan faktor krusial dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana BOS, khususnya di sekolah dasar Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Oleh sebab itu, peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan dan pendidikan bagi kepala sekolah serta bendahara

menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator Kompetensi SDM (X2) dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai r hitung yang melampaui r tabel (0,2227) dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,791. Namun, dari hasil uji t parsial, nilai t hitung sebesar 0,563 tidak melebihi t tabel (1,992) serta tingkat signifikansi 0,575 melebihi batas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Kompetensi SDM secara individual tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Sebaliknya, uji F simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dengan nilai R^2 sebesar 0,483 yang menandakan bahwa 48,3% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dapat dijelaskan oleh Literasi Keuangan, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Kompetensi SDM, sebagaimana yang diuraikan oleh Spencer dan Spencer (1993), merupakan kemampuan dan kualitas individu dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan secara profesional. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Yuliani (2021) dan Feri Harnando (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Siti Munjiah dan Rulfah (2021) di Banda Aceh mendukung hasil penelitian ini, yakni bahwa kompetensi saja tidak cukup tanpa adanya sistem pendukung, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Kandangan, keterbatasan infrastruktur, pelatihan yang belum merata, serta penggunaan aplikasi ARKAS dan SIPLah yang belum optimal menjadi faktor penghambat pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas. Hanya 41% sekolah yang telah menggunakan ARKAS, sehingga kompetensi yang ada belum dapat dimaksimalkan secara efektif.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM saja tidak cukup untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di sekolah dasar Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Upaya peningkatan akuntabilitas membutuhkan sinergi antara kompetensi individu, sistem pengendalian internal yang kuat, dukungan infrastruktur teknologi, pengawasan yang konsisten, serta keterlibatan semua pihak terkait. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu difokuskan pada penguatan sistem dan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya pada pengembangan kapasitas individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) valid dan reliabel, dengan nilai r hitung berkisar antara 0,633 hingga 0,814, melebihi r tabel 0,2227, serta nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,806. Analisis uji t parsial menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,084 yang jauh melampaui t tabel (1,992) dan tingkat signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Uji F simultan juga memperkuat hasil ini, di mana variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,483 mengindikasikan bahwa sekitar 48,3% variasi

akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dijelaskan oleh Literasi Keuangan, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Secara khusus, pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,535 dan uji signifikansi yang memadai, sehingga hipotesis H3 diterima. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Laudon dan Laudon (2015), bahwa pemanfaatan teknologi secara optimal dapat mempercepat arus informasi dan mengurangi potensi manipulasi data. Implementasi aplikasi ARKAS dan SIPLah di sekolah dasar, misalnya, memungkinkan terwujudnya pelaporan real-time, transparansi data, serta efisiensi administrasi. Penelitian Ahmad dan Rahman (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis web mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Akan tetapi, di Kecamatan Kandangan, masih terdapat disparitas penggunaan teknologi, di mana 53,8% sekolah telah menggunakan kedua aplikasi tersebut, sementara 5,1% belum pernah memanfaatkannya, sehingga kesenjangan digital ini perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor utama yang berkontribusi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di sekolah dasar Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Optimalisasi penggunaan aplikasi seperti ARKAS dan SIPLah sangat penting untuk mempercepat proses pelaporan, meningkatkan transparansi, serta menekan potensi kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Kesimpulan

Temuan empiris dalam studi ini mengonfirmasi adanya korelasi positif yang signifikan antara variabel literasi keuangan dengan akuntabilitas tata kelola Dana BOS. Data menunjukkan bahwa kedalaman kognisi finansial yang dimiliki oleh kepala sekolah dan bendahara berfungsi sebagai katalisator utama dalam mendorong transparansi serta kualitas pertanggungjawaban anggaran. Secara spesifik, aktor pendidikan dengan tingkat literasi yang mumpuni terbukti memiliki kecakapan superior dalam mengawal seluruh siklus anggaran—mulai dari formulasi perencanaan, eksekusi program, hingga penyusunan laporan—yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya pengelolaan dana yang akuntabel.

Di sisi lain, temuan statistik memperlihatkan anomali di mana variabel kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ini disinyalir kuat berakar pada defisiensi infrastruktur penunjang serta minimnya intervensi pelatihan profesional yang berkelanjutan. Artinya, meskipun secara individual para pengelola dana memiliki kapabilitas yang memadai, potensi tersebut terhambat oleh absennya ekosistem sistemik dan mekanisme pengawasan yang rigid, sehingga optimalisasi akuntabilitas sulit terwujud.

Sementara itu, variabel pemanfaatan teknologi informasi terkonfirmasi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas akuntabilitas tata kelola Dana BOS. Kehadiran platform digital seperti ARKAS dan SIPLah menjadi instrumen vital yang tidak hanya mengakselerasi siklus pelaporan dan mendorong transparansi,

tetapi juga efektif dalam memitigasi risiko inakurasi administratif (human error). Dengan demikian, optimalisasi integrasi teknologi menjadi kunci ganda dalam mewujudkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Secara kolektif, variabel literasi keuangan, kapabilitas sumber daya manusia, dan adopsi teknologi informasi terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas akuntabilitas tata kelola Dana BOS. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas bukanlah variabel yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari orkestrasi yang harmonis antara pemahaman finansial yang mendalam, kompetensi personel yang mumpuni, serta dukungan teknologi yang efektif. Oleh karena itu, guna mengeskalasi standar akuntabilitas di sekolah dasar wilayah Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, diperlukan intervensi yang bersifat holistik dan kolaboratif. Pemerintah daerah bersama pihak sekolah didorong untuk bersinergi dalam mengintensifkan pelatihan vokasi (literasi keuangan & IT), memperkuat mekanisme pengendalian internal, serta melengkapi infrastruktur digital. Langkah-langkah strategis ini krusial untuk menjamin terciptanya ekosistem pengelolaan dana yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sintesis hasil penelitian mengonfirmasi bahwa variabel Literasi Keuangan serta Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan sebagai determinan positif yang signifikan dalam memperkuat akuntabilitas tata kelola Dana BOS di Sekolah Dasar Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di sisi lain, temuan ini juga mengungkap fakta kontradiktif di mana Kompetensi SDM belum mampu memberikan dampak nyata dalam konteks tersebut. Berangkat dari realitas empiris ini, sejumlah rekomendasi strategis dirumuskan guna penyempurnaan praksis manajerial maupun agenda riset di masa depan.

Pertama, pemerintah daerah bersama sekolah perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan guna memperkuat Literasi Keuangan bagi kepala sekolah dan bendahara. Upaya ini dapat didukung dengan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya literasi keuangan melalui berbagai media dan kegiatan, sehingga pemahaman seluruh pemangku kepentingan semakin optimal. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, terutama di sekolah-sekolah dengan keterbatasan akses internet dan perangkat pendukung. Selain penyediaan perangkat dan jaringan, pelatihan intensif mengenai penggunaan aplikasi keuangan, seperti ARKAS dan SIPLah, serta keterampilan pengelolaan data dan pelaporan digital perlu terus ditingkatkan.

Selanjutnya, meskipun kompetensi SDM belum terbukti signifikan, pengembangan kapasitas melalui pelatihan yang komprehensif tetap penting. Program pelatihan ini dapat meliputi pemahaman regulasi, prosedur keuangan, hingga pengembangan keterampilan teknis dan manajerial. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala, misalnya melalui audit dan pemberian umpan balik konstruktif, agar kompetensi SDM dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik pengelolaan Dana BOS.

Untuk agenda penelitian berikutnya, disarankan agar menggunakan pendekatan kualitatif atau studi kasus guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait

tantangan dan strategi pengelolaan Dana BOS di tingkat sekolah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain, seperti partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, serta kebijakan daerah yang memengaruhi akuntabilitas. Selain itu, model analisis multi-level dapat digunakan untuk mengkaji pengaruh tidak langsung dari aspek eksternal, seperti kebijakan anggaran dan kualitas infrastruktur digital. Pengembangan instrumen survei berbasis mobile yang real-time akan sangat membantu dalam memantau dinamika pengelolaan Dana BOS. Studi eksperimental, seperti randomized controlled trial (RCT) di sekolah percontohan, dapat dilakukan untuk menguji efektivitas intervensi literasi keuangan berbasis simulasi digital. Sementara itu, social network analysis juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan pola komunikasi dan pertukaran pengetahuan antar aktor kunci, sehingga dapat diidentifikasi pihak-pihak yang berperan penting dalam menyebarkan praktik akuntabilitas terbaik di lingkungan sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K., Puspitasari, D., & Wijayanti, R. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 19(1), 45–60.
- Agustini, S., Nasution, M. K., & Putri, R. N. (2022). Pengaruh literasi keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 15(1), 45-59
<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/download/1717/873>
- Ahmad, & Rahman, A. (2021). Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan Dana BOS berbasis web untuk peningkatan akuntabilitas. *eJurnal Universitas Mulawarman*, 9(2), 112–125.
- Ahmad, F., & Rahman, M. (2021). Penerapan sistem informasi pengelolaan Dana BOS berbasis web untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 123-134.
<https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JIM/article/download/6139/pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan Dana BOS di beberapa daerah. BPK RI. <https://sulbar.bpk.go.id/?p=34762>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2023. Jakarta: BPK RI.
- Bagas Nugraha, A., Susanti, R., & Pratama, Y. (2022). Transparansi dan teknologi informasi: Pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 8(1), 78–91.
- Bovens, M. (2021). Adaptive accountability in public governance. In M. Bovens, T. Schillemans & R. Goodin (Eds.), *The Oxford handbook of public accountability* (2nd ed., pp. 45–68). Oxford University Press.

- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128. [https://doi.org/10.1016/S1057-0810\(99\)80006-7](https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7)
- Dinas Pendidikan Jawa Timur. (2023). Data pemanfaatan aplikasi ARKAS di Kabupaten Kediri tahun 2023. Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
- Feri Harnando. (2024). Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Dana BOS di Kabupaten Siak [Skripsi, UIN Suska Riau]. Repository UIN Suska Riau.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Cet. 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316.
- Jogiyanto, H. M. (2007). Sistem informasi akuntansi (4th ed.). BPFE Yogyakarta.
- Jumiari, M., & Sujana, E. (2024). Pengaruh pemahaman standar akuntansi, aksesibilitas, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 55–70.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Statistik pendidikan dasar 2023. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2015). *Management information systems: Managing the digital firm* (14th ed.). Pearson Education.
- Lussier, R. N. (2008). *Management fundamentals: Concepts, applications, and skill development* (5th ed.). Thomson South-Western.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sumber daya manusia*. UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (Edisi Revisi). Andi Offset.
- Nurkholis, A. (2011). Transparansi dan akuntabilitas keuangan pendidikan dalam penerapan good governance. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(1), 12-24.
- Nursalam. (2024). Pengaruh literasi keuangan terhadap kualitas pengelolaan Dana BOS di sekolah dasar [Tesis, Universitas Negeri Jakarta]. Repository UNJ.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022*. Jakarta: OJK.
- Pratiwi, R. (2023). Literasi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 201–215.
- Reny Arinda, Ruhul Fitrius, & Novita Indrawati. (2022). Pengaruh kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(3), 312–328.
- Rodriguez, J., & Patel, P. (2022). Dynamic competency model: A contextual framework for public sector finance. *Journal of Public Administration and Finance*, 11(2), 45–61.
- Rodziyah, S. (2024). Pengaruh literasi keuangan terhadap pertanggungjawaban dana BOS di Kabupaten Kediri. *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, 10(1), 65-79.
- Rodziyah. (2024). Literasi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 15(1), 88–102.

- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>
- Sakdiah, R., Mardiah, S., & Yusuf, M. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 10(2), 150–162.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Cetakan ke-26)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cet. 27)*. Bandung: Alfabeta.
- Supit, B. A. (2022). *Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan Dana BOS [Tesis, Universitas Sam Ratulangi]*. Repository UNSRAT.
- Turambi, K., Budiarmo, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 15(1), 45–58.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- United Nations Development Programme. (2020). *Governance for sustainable development: A new framework for the SDGs*. New York: UNDP.
- Yuliani, I. (2021). Pengaruh kompetensi kepala sekolah terhadap pelaporan keuangan di sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 99-112. <https://repository.iainpalopo.ac.id/3434/1/Yuliani%20Ismail.pdf>
- Yuliani, N. (2021). Pengaruh kompetensi administrasi kepala sekolah terhadap kepatuhan pelaporan keuangan Dana BOS [Skripsi, IAIN Palopo]. Repository IAIN Palopo.